PEDOMAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN 2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 56 BD 2024/NO. 57, 23 HLM
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan untuk melaksanakan program serta kegiatan Pemerintah Daerah diperlukan pemenuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pengelolaan penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan, maka perlu dibentuk pedoman pengelolaan penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No.13 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.35 Tahun 2021, PERPRES No.16 Tahun 2018
- Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi perangkat daerah dalam penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29
   November 2024 dan ditetapkan tanggal 29 November 2024
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2010 Pengaturan Tenaga Pekerja Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 21) dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Penjelasan: -
- Lampiran: 10 Hlm.